

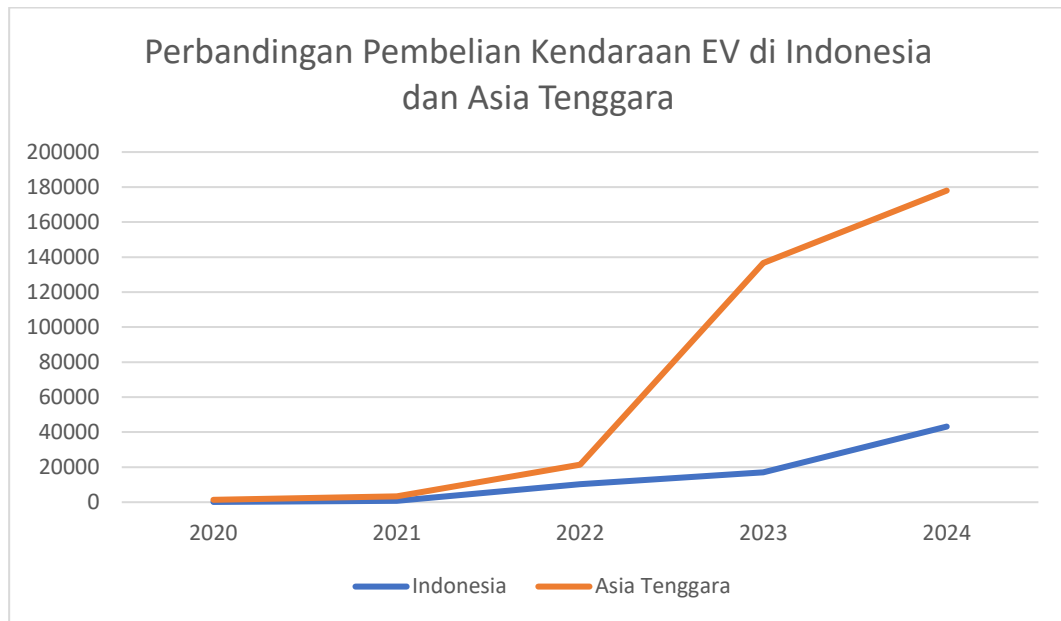
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi modern telah menyuguhkan alternatif baru dalam industri transportasi, yakni kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*). Kendaraan jenis ini dianggap sebagai solusi potensial untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermesin bahan bakar fosil. Emisi karbon yang tinggi telah menjadi penyebab utama perubahan iklim dunia, sehingga penerapan kendaraan listrik diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif tersebut.

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai mendukung adopsi kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan. Di Indonesia, kendaraan listrik masih berada dalam tahap pengembangan. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2023), penetrasi kendaraan listrik di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara asia tenggara. Hal ini dapat dilihat dari data perbandingan pembelian kendaraan listrik di Indonesia dengan rata-rata pembelian kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*) di Asia Tenggara.



Gambar 1.1 Perbandingan Pembelian Kendaraan EV di Jakarta dan Asia Tenggara

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Dapat kita lihat pada tabel 1.1 bahwa pembelian kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*) di Indonesia masih sangat jauh atau lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata penjualan di Asia. Di Indonesia sendiri persebaran kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*). Pembelian kendaraan listrik di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan kendaraan listrik adalah ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian daya listrik yang memadai. Maka dari itu persebaran penggunaan kendaraan listrik maupun pembelian kendaraan listrik terbesar di Indonesia dipegang oleh kota Jakarta. Menurut survei yang dilakukan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) pada tahun 2024 pembelian dan penggunaan kendaraan listrik paling banyak adalah DKI Jakarta dengan persentase 24,4%. Hasil dari survei

tersebut memiliki korelasi positif bahwa pembelian kendaraan listrik dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai.

Infrastruktur pengisian daya listrik merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung adopsi kendaraan listrik. Tanpa infrastruktur yang cukup, penggunaan EV akan terhalang karena kesulitan mencari tempat pengisian yang aman dan nyaman. Sebaliknya, ketika infrastruktur pengisian daya tersedia secara luas dan mudah diakses, maka masyarakat cenderung lebih tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik. Misalkan saja penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2024) menunjukkan bahwa ketersediaan stasiun pengisian daya secara langsung berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli kendaraan listrik. Semakin luas dan mudah diaksesnya infrastruktur pengisian daya, semakin besar kemungkinan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah SPKLU di Jakarta dan Bangkok

Perbandingan Jumlah SPKLU di Jakarta dan Bangkok		
Tahun	Jakarta (unit)	Bangkok (unit)
2020	3	~300
2021	10	~500
2022	36	~700
2023	79	~900
2024	126	~1.000

Sumber: Data diambil dari PLN dan EVAT

Pada tabel 1.1 yang memberikan gambaran atas perbandingan jumlah SPKULU antara Jakarta dan Bangkok, memberikan gambaran seberapa pentingnya faktor infrastruktur dalam mendorong daya beli maupun penggunaan kendaraan listrik di suatu negara/kota. Jika dilihat daya beli dan penggunaan kendaraan listrik di Bangkok jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta yaitu sekitar 4,5 kali lebih banyak pada tahun 2023 dan 1,6 kali lebih banyak pada tahun 2024

dibandingkan dengan Jakarta. Hal tersebut selaras dengan teori TPB (*Teori Planned Behaviour*), dimana teori tersebut mempelajari proses perilaku manusia dalam pengambilan keputusan. Setiap individu yang membeli kendaraan EV akan melakukan pertimbangan dan perencanaan sebelum membeli, terutama dalam bagian fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Selain infrastruktur pengisian daya, insentif parkir gratis atau diskon parkir juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap EV. Insentif ini umum diberikan oleh pemerintah di berbagai negara untuk mengurangi biaya operasional kendaraan listrik dan meningkatkan fleksibilitas pemilik EV dalam beraktivitas di daerah perkotaan yang padat. Penelitian oleh (Sukmayanti & Satory (2025) menunjukkan bahwa insentif parkir gratis di area perkotaan memiliki pengaruh positif terhadap adopsi kendaraan listrik. Konsumen yang tidak lagi dipungut biaya parkir akan lebih siap untuk membeli EV karena mereka dapat menghemat uang yang tadinya digunakan untuk biaya parkir.

Penelitian dari (Sukmayanti & Satory (2025) selaras dengan praktik langsung yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta terhadap kebijakan untuk mendukung pembelian EV. Kebijakan tersebut meliputi tarif PKB 0% mengenai PKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai (Pergub DKI Jakarta No. 38 Tahun 2023), melakukan pembangunan infrastruktur pengisian daya dengan berbagai pihak guna memperluas jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di seluruh wilayah Jakarta, hingga pertengahan tahun 2024 terdapat lebih dari 120 SPKU yang tersebar di berbagai lokasi strategi di Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut, Jakarta masih memiliki celah besar dalam pengembangan infrastruktur pendukung EV. Misalkan saja, pemerintah sendiri telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan, seperti pembangunan stasiun pengisian daya, pemberian keringanan pajak, dan insentif lainnya, termasuk fasilitas parkir gratis dan jalur khusus untuk kendaraan listrik. Namun, adopsi EV masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan keberlanjutan insentif yang diberikan.

Fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah, seperti infrastruktur pengisian daya, insentif parkir, jalur khusus untuk EV, serta keringanan pajak, merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam mengadopsi kendaraan listrik. Fasilitas ini diyakini dapat meningkatkan pembelian kendaraan listrik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai sejauh mana fasilitas yang disediakan pemerintah dan insentif pajak dapat memengaruhi minat beli kendaraan listrik di Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur pengisian daya listrik yang disediakan pemerintah terhadap pembelian kendaraan listrik (EV) di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh insentif parkir dan jalur khusus untuk kendaraan listrik terhadap pembelian kendaraan listrik (EV) di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh keringanan pajak untuk kendaraan listrik terhadap pembelian kendaraan listrik (EV) di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam pengaruh fasilitas yang disediakan oleh pemerintah terhadap penerimaan pajak kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*) di Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkontribusi terhadap adopsi kendaraan listrik, tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1.3.1 Menganalisis Pengaruh Infrastruktur Pengisian Daya Listrik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan infrastruktur pengisian daya listrik mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli kendaraan listrik. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran pengguna mengenai aksesibilitas pengisian daya, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke kendaraan listrik. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana keberadaan stasiun pengisian daya yang strategis dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan kendaraan listrik dan, pada gilirannya, meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini.

1.3.2 Menganalisis Pengaruh Insentif Parkir dan Jalur Khusus untuk Kendaraan Listrik

Tujuan selanjutnya adalah untuk mengevaluasi dampak insentif parkir gratis atau diskon parkir serta jalur khusus yang diberikan kepada pemilik kendaraan listrik terhadap penerimaan pajak kendaraan listrik. Penelitian ini akan meneliti bagaimana insentif tersebut dapat mengurangi biaya operasional bagi pengguna EV dan meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi efektivitas insentif tersebut dalam mendorong adopsi EV.

1.3.3 Menganalisis Pengaruh Keringanan Pajak untuk Kendaraan Listrik

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sejauh mana kebijakan keringanan pajak, baik dalam bentuk pengurangan pajak pembelian maupun penghapusan pajak tahunan, dapat berkontribusi pada peningkatan adopsi kendaraan listrik. Dengan menganalisis data dari berbagai negara yang telah menerapkan kebijakan serupa, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana keringanan pajak dapat menarik lebih banyak konsumen untuk memilih kendaraan listrik dan dampaknya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

1.3.4 Memberikan Rekomendasi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi pemerintah dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Dengan memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dari kendaraan listrik, pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan yang ada dan menerapkan-program baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.3.5 Menambah Wawasan Ilmiah dalam Bidang Akuntansi Perpajakan

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang akuntansi perpajakan dengan menganalisis hubungan antara fasilitas pemerintah dan penerimaan pajak kendaraan listrik. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan panduan bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi perpajakan yang lebih efektif terkait dengan kendaraan listrik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami pengaruh fasilitas pemerintah terhadap penerimaan pajak kendaraan listrik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung transisi menuju penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar kendaraan listrik serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Manfaat penelitian ini sangat strategis dalam menciptakan pola pikir yang sistematis dan logis dalam mengidentifikasi bagaimana fasilitas yang disediakan pemerintah dapat memperkuat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diraih dari hasil penelitian ini.

1.3.6 Meningkatkan Adopsi Kendaraan Listrik

Infrastruktur Pengisian Daya: Penelitian ini menyoroti betapa pentingnya infrastruktur pengisian daya listrik dalam meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan investasi infrastruktur sebagai langkah awal menuju transisi energi ramah lingkungan.

1.3.7 Peningkatan Penerimaan Pajak

Insentif Parkir dan Jalur Khusus: Insentif parkir gratis atau diskon parkir, serta jalur khusus untuk kendaraan listrik, diprediksi meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik, sehingga penerimaan pajak dari sektor ini pun akan meningkat. Hal ini berkontribusi signifikan pada sumber pendapatan negara.

1.3.8 Optimasi Kebijakan Publik

Keringanan Pajak: Kebebasan pajak untuk kendaraan listrik telah terbukti meningkatkan daya tarik konsumen terhadap kendaraan ramah lingkungan. Dengan demikian, pemerintah dapat merevisi kebijakan pajaknya agar lebih fleksibel dan mendukung transisi energi hijau.

1.3.9 Sumber Pendapatan Negara Masa Depan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lengkap tentang potensi pajak kendaraan listrik sebagai salah satu sumber pendapatan penting bagi

negara di masa depan. Hal ini relevan dengan strategi ekonomi nasional yang fokus pada pengembangan teknologi hijau.

1.3.10 Kontribusi Ilmiah Terhadap Bidang Akuntansi Perpajakan

Penelitian ini juga berkontribusi dalam bidang akuntansi perpajakan karena memberikan analisis empiris tentang hubungan antara fasilitas pemerintah dan penerimaan pajak kendaraan listrik. Hasilnya dapat digunakan sebagai acuan teoritis maupun praktis dalam konteks Indonesia dan negara-negara lain yang sedang menjalankan program transisi energi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berguna secara operasional tapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan teori dan praktik akuntansi perpajakan, khususnya terkait dengan pola adopsi kendaraan listrik dan dampaknya terhadap penerimaan pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai topik penelitian dengan dilengkapi dengan penelitian terdahulu. Kemudian berisi tentang aturan dari

kerangka pemikiran Peneliti dalam bentuk skema seria hipotesis yang diajukan sebagai implikasi hubungan antar variabel penelitian.

BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan terkait definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, langkah-langkah yang dijadikan metode pengumpulan serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan deskripsi terkait objek penelitian, hasil dari analisis data. serta interpretasi atas hasil analisis yang ditemukan selama penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai evaluasi Penelitian, serta saran dan rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.